

Pihak Kemendag Tak Hadir, Sidang Gugatan Praperadilan MAKI Ditunda

JAKARTA (IM) - Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi ditunda hingga Senin (18/4) pekan depan.

Penundaan sidang menurut hakim tunggal Dewa Ketut Kartana karena Lutfi atau pihak Kementerian Perdagangan tidak ada yang hadir.

"Dari termohon sudah kita panggil per tanggal 5 April 2022, jadi termohon mengirim surat tidak bisa hadir," tutur Ketut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (11/4).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyesalkan ketidakhadiran Lutfi. Dalam pandangannya, alasan tidak menghadiri persidangan mengada-ada.

"MAKI kecewa atas ketidakhadiran pihak Kementerian Perdagangan, karena ini panggilan sudah seminggu lalu dan kita sudah mengaju-

kan gugatan itu sudah lebih dari dua minggu," ujarnya.

Diketahui MAKI mengajukan praperadilan terhadap Lutfi karena pernyataannya terkait penetapan tersangka mafia minyak goreng.

Di depan Komisi VI DPR 17 Maret 2022, Lutfi mengklaim mafia itu penyebab langka stok dan tingginya harga minyak goreng. Ia juga mengaku telah memberikan berbagai bukti pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Tapi hingga saat ini tidak ada satu pun tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Bahkan Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Irjen Pol Helmy Santika menyampikan belum menemukan adanya praktik persengkongkolan bersifat masif, terstruktur dan melibatkan banyak pihak.

Praktik kecurangan hanya ditemukan pada pelaku usaha perseorangan yang tidak mengikuti aturan pemerintah terkait harga dan distribusi minyak goreng. ● han

Komnas: Tak Ada Pelanggaran HAM Saat Densus 88 Tangkap Dokter Su

JAKARTA (IM) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait penembakan Dokter Su, terduga teroris yang tewas ditembak tim Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 Polri.

Anam mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap dua orang anggota Densus 88 Polri yang berada di lokasi, keluarga Dokter Su, masyarakat sekitar dan pengecekkan langsung ke lapangan. Ia mengatakan, dari penyelidikan tersebut, ditetapkan bahwa penangkapan yang dilakukan Densus 88 Polri tidak melanggar hak asasi manusia.

"Proses penangkapan Dokter Su sampai kematian sudah sesuai dengan prosedur dan tidak terdapat pelanggaran hak asasi manusia," kata Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (11/4).

Anam mengatakan, penangkapan Dokter Su sudah memenuhi prinsip nesesita dan

kehati-hatian. Penangkapan dilakukan dengan pertimbangan tidak dilakukan di tempat kerja dan kediamannya karena menghindari pasien, anak-anak dan keluarga akan munculnya trauma psikologis, sehingga penangkapan dilakukan di jalan.

"Selain itu Dokter Su tidak menggunakan mobil seperti yang sekarang dipakai, tapi menggunakan mobil lain berupa ambulans dan itu juga dihindari, makanya ketika dipastikan pas hari itu Dokter Su menggunakan mobil dan jaraknya ketahuan distulit terjadi penangkapan," ujarnya.

Anam melanjutkan, proses penangkapan Dokter Su sudah memenuhi prinsip legalitas karena sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya diberitakan, Dokter Su tewas saat hendak ditangkap oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Dia diamankan Densus 88 di Jalan Kampung Dukuh Cendono, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (9/3) pukul 21.18 WIB. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER KEMENTERIAN DESA PDTT DENGAN KOMISI V DPR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait desa tertinggal serta rekrutmen Tenaga Pendamping Desa.

Jokowi Pastikan Pemilu 14 Februari 2024, Sudahi Wacana Penundaan Pemilu

Dalam rapat terbatas kabinet pada Minggu (10/4), Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soparno menyatakan, pihaknya mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 14 Februari 2024.

Eddy mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menghapus berbagai asumsi mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

"Dengan demikian berbagai diskursus terkait topik 'penundaan Pemilu' sudah sepatutnya dihentikan dan kita fokus pada persiapan dan penganggaran Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 bisa terlaksana tanpa hambatan, mengingat tahapan Pemilu

akan dimulai bulan Juni yang akan datang," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (11/4).

Eddy menuturkan, pernyataan Jokowi tersebut merupakan bentuk komitmen untuk taat pada konstitusi.

"Selaras dengan itu, kami di PAN juga memiliki komitmen yang sama untuk tunduk dan patuh pada konstitusi serta bersama-sama merawat dan menjaga demokrasi kita," ujar Eddy.

Eddy pun menegaskan, PAN siap berkompetisi pada Pemilu 2024 mendatang. Ia menyebut, pihaknya telah melakukan konsolidasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Wakil ketua Komisi VII DPR itu mengatakan, pada awal 2021 lalu pun, PAN juga

sudah mempersiapkan rekrutmen saksi pemilu dan persiapan verifikasi administrasi.

PAN menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia untuk mencegah kejadian pada Pemilu 2019 di mana banyak petugas pemilu yang meninggal dunia.

"Apalagi beban penyelenggara Pemilu di tahun 2024 semakin berat karena di tahun yang sama juga menyelenggarakan Pilkada di seluruh Indonesia yang berjumlah 572. Sungguh sebuah kerja yang tidak ringan dan kompleks," kata Eddy.

Seperti diketahui, PAN merupakan salah satu partai yang sempat menyuarakan wacana menunda Pemilu 2024, dua partai lain yang pernah mengangkat wacana ini adalah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat terbatas kabinet pada Minggu (10/4), Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan ses-

uai jadwal, yakni 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," kata Kepala Negara.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimarit Girsang menilai, dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, maka hal itu tetap berdasarkan keputusan di legislatif. Ia menegaskan, terkait Pemilu merupakan ranah dari legislatif, bukan pihak eksekutif.

"Pemilu kan sudah diputuskan di Komisi 2, 14 Februari 2024, itu menjadi pemilu presiden dan pemilu legislatif. Untuk November itu adalah Pilkada serentak seluruh Indonesia sudah kita putuskan, jadi kenapa harus ribut gitu ya?" kata Junimarit ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Politisi PDI-P itu juga menyentil beberapa menteri yang justru menyuarakan penundaan pemilu. Padahal, menurut dia, pihak eksekutif tidak berwenang berbicara soal pemilu.

"Kedua, masalah tunda, perpanjangan, mundur atau apapun menyangkut pemilu, itu menjadi kewenangan legislatif, bukan kewenangan eksekutif," ucapnya.

"Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya, kan begitu," tambahnya. ● han

KSP: Jika Infrastruktur Siap, Kantor Kedubes Asing Harus di IKN

JAKARTA (IM) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menegaskan, apabila infrastruktur sudah siap, semua kantor kedutaan besar negara asing diwajibkan berada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kalau untuk sementara mungkin boleh saja (di luar IKN). Tapi nanti pada saat infrastruktur dan zona untuk kedubes asing sudah ready di IKN mereka toh harus pindah juga," ujar Wandy saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/4).

Pindah ke lokasi IKN memang harus dilakukan oleh kedubes asing. Jika tidak di IKN, izin pendirian bangunan untuk kedubes tak bakal dikeluarkan.

"Nanti enggak dapat izin. Ini kan negara Republik Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Beredar informasi yang menyebutkan sejumlah kedubes asing lebih memilih membuka kantor di Kota Balikpapan daripada di wilayah IKN Nusantara. Informasi tersebut juga menyebutkan sejumlah kedubes yang akan buka kantor di Balikpapan, antara lain Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, India, Korea Selatan, Prancis, Swiss, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Jepang, Belanda, Uni Eropa dan Inggris.

Selain itu Kantor Sekretariat ASEAN juga dikabarkan pindah ke Balikpapan, bukan IKN. Menanggapi informasi itu, mengaku belum secara langsung membaca pernyataan dari para kedubes asing. Se-

hingnya dirinya menduga niatan membuka kantor di Balikpapan bersifat sementara.

"Saya menduga untuk sementara ya. Tapi saya belum baca langsung pernyataan mereka. Kalau alasannya, karena Balikpapan memang sudah ready infrastrukturnya," tutur Wandy.

Wandy menjelaskan, jarak wilayah Kantor Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan Kota Balikpapan hanya sekitar 30 hingga 40 menit apabila jalan tol yang menghubungkan kedua kawasan telah tersambung. Alasan lain, lanjut Wandy, kemungkinan supaya mudah berkoordinasi atau untuk hunian.

"Sementara para diplomatnya yang ditugaskan di IKN. Toh pemindahannya sudah saya akan bertahap untuk perwakilan negara asing dan organisasi internasional," ungkap Wandy.

Dia menuturkan, dahulu Balikpapan memang sudah didesain untuk lokasi tinggal para ekspatriat. Sebab pada beberapa dekade lalu Indonesia masih booming memproduksi minyak mentah.

Saat disinggung soal kesiapan kedubes mana saja yang akan berkantor di Balikpapan, Wandy belum dapat menegaskan. Palsalnya saat ini Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rencana Induk Tata Ruang IKN baru akan terbit.

"Mereka (kedubes asing) juga belum tahu di bagian mana IKN mereka akan ditempatkan. Jadi sebenarnya mereka juga masih menunggu. Demikian perkiraannya," kata Wandy. ● han



ANDI ARIEF DIPERIKSA KPK

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (11/4). Andi Arief diperiksa sebagai saksi terkait perkara suap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.

Serda Fredrik Terharu Saat Kasad Menjenguk Putri Kembang Siamnya

MANADO (IM) - Serda Fredrik Lumowa merasa terharu dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kasad TNI Jenderal Dudung Abdurachman yang telah memberikan perhatiannya dengan datang serta melihat secara langsung kedua putrinya tersebut di Manado, Senin, (11/4).

"Kami sekeluarga sangat terharu. Terima kasih bapak Kasad dan Ibu, yang telah datang melihat putri kami. Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kami sekeluarga, dan menjadi doa bagi keselamatan serta kesehatan anak kami," ujarnya.

Disela-sela kunjungannya ke Kodam XIII/Merdeka, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ny. Rahma Dudung Abdurachman secara khusus menjenguk si kembar siam Joana dan Jovalin untuk memastikan kondisi kesehatan mereka yang sedang dalam proses tindakan medis untuk dilakukan operasi pemisahan beberapa hari ke depan.

Joana dan Jovalin saat ini baru berumur 2 tahun 3 bulan, keduanya merupakan putri

dari pasangan Serda Fredrik Lumowa dan Marcela Amelia Sumakul. Sang ayah, Serda Fredrik merupakan prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 1302/Minahasa.

Saat bertemu si kembar, Kasad menyampaikan bahwa dirinya ingin memastikan seluruh kesiapan dan melihat perkembangan kondisi kesehatan Joana dan Jovalin sebelum menjalani operasi pemisahan.

"Kita semua mendoakan keduanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan operasi yang akan dilaksanakan berjalan dengan aman serta lancar," ucap Kasad.

Lebih lanjut Kasad menyampaikan operasi pemisahan akan direncanakan pada 21 April mendatang di RSUP Prof. Kandou Mahalayang Kota Manado yang secara intens bekerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto.

"Awalnya akan dibawa ke RSPAD, namun karena sudah dirawat sejak kecil disini, sehingga dokter disini lebih paham kondisi dan rumah sakit disini mampu melaksanakan operasi tersebut," jelasnya. ● han

Andi Arief Diperiksa Penyidik KPK terkait Kasus Korupsi Bupati PPU

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi Partai Demokrat Andi Arief terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

Andi diperiksa sebagai saksi untuk Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud yang sudah berstatus tersangka. Usai diperiksa KPK, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat itu mengaku ditanya soal mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Kalimantan Timur.

"Saya diperiksa 2 jam ya, tentang mekanisme Musda. Dan bukan tugas saya sebenarnya. Tapi tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Musda, itu saja," ujar Andi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,

Senin (11/4).

Kepada wartawan Andi mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud terkait Musda tersebut.

"Enggak (pernah komunikasi dengan Bupati PPU), (ditanya) mekanismenya saja, soal mekanisme Musda," ucap Andi.

"Apakah Bappilu menyelenggarakan Musda atau bidang lain, Bappilu enggak ada urusan sama Musda," tuturnya.

Andi keluar dari Gedung KPK pukul 13.23 WIB. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak dan masker. Ini kali kedua Andi dipanggil KPK. Pada pemanggilan pertama, Senin (28/3) lalu, Andi tidak datang karena alamat pengiriman yang salah.

Abdul Gafur ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Kalimantan

Timur pada 12 Januari lalu. Seusai OTT tersebut, KPK mengumumkan enam orang juri tersangka terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU.

Selain Abdul Gafur, KPK juga menetapkan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis, Mulydi yang meruoakan Plt Sekretaris Daerah PPU, serta Edi Hasmor yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU, sebagai tersangka.

Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU Jusman serta pihak swasta bernama Achmad Zudi juga ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat itu mengatakan, tim KPK mengamankan uang Rp 1,4 miliar dari penangkapan Abdul Gafur di lobi mal wilayah Jakarta Selatan. ● mei



PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL UU PEMILU

Pemohon Fahri Hamzah menyampaikan pendapatnya secara virtual saat sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Senin (11/4). Sidang dengan agenda perbaikan permohonan tersebut menghadirkan pemohon Muhammad Anis Matte, Mahfuz Sidik dan Fahri Hamzah secara virtual.

RENCANA PENJUALAN/PENGALIHAN SAHAM PT WISNU NUGRA SAKTI ("Perseroan")

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (2) juncto Pasal 127 Ayat (4), (5) dan (8) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para kreditor, para debitor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bahwa:

1. Seluruh saham Perseroan akan dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga dengan demikian akan menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan.

2. Pelaksanaan penjualan/pengalihan saham tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan, UUPT, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagi pihak-pihak yang berkeberatan sehubungan dengan rencana penjualan/pengalihan saham Perseroan tersebut, dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini, dapat mengirimkan surat keberatan ke kantor Perseroan dengan alamat di Wisma Millenia LTLG Jln.MT.Haryono Kav.16 RT.010/005, Kel.Tebet Barat, Kec.Tebet, Jakarta Selatan 12810, pada hari dan jam kerja.

Jakarta, 12 April 2022
Direksi PT WISNU NUGRA SAKTI